

# ANALISIS ATAS LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

RUNIK PUJI RAHAYU  
Universitas Madura

## ABSTRAK

Laporan Realisasi anggaran merupakan jenis laporan keuangan daerah yang lebih dahulu dihasilkan sebelum kemudian diisyaratkan untuk membuat laporan neraca dan laporan arus kas. Anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung (*back-bone*) penyelenggaraan pemerintahan. Usaha pemerintah daerah dalam menggali sumber danayang berasal dari potensi daerah yang dimiliki serta kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber dana yang ada tercermin dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Oleh karena itu laporan realisasi anggaran menjadi salah satu laporan pertanggung jawaban keuangan daerah yang utama. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang jujur, demokratis, efektif, efisien, ekonomis dan kuantitatif, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan dan belanja daerah perlu dilaksanakan meskipun terdapat perbedaan kaidah pengakuntansianya dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.

Berdasarkan latar belakang diatas, perlu diteliti mengenai kinerja keuangan daerah di kabupaten Pamekasan, sehingga peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan judul: Analisis atas Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan (Studi Kasus Dinas Pu Bina Marga).

## Pendahuluan

Mewujudkan *Good Governance* diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistis, dimana pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta bisa memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara regional, nasional maupun internasional. Menanggapi paradigma baru tersebut maka pemerintah memberikan otonomi kepada daerah seluas-luasnya yang bertujuan untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan

kepada masyarakat.

Dalam laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Laporan realisasi anggaran terdiri atas beberapa elemen (pos) utama yaitu: pendapatan, transfer, belanja, surplus atau defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto dan, sisa lebih/kurang pembiayaan

anggaran (SiLPA/SiKPA).

Diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 yang dikenal dengan sebutan otonomi daerah, kemudian untuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dikeluarkan juga UU No. 33 Tahun 2004 dan tentunya kedua UU ini erat kaitannya karena secara otomatis dengan adanya peralihan wewenang pemerintah dari pusat ke daerah maka harus diikuti dengan penyerahan keuangan yang dipercayakan pemerintah pusat untuk bisa mengolah keuangan dari masing-masing daerah. Memang kehadiran UU No. 33 Tahun 2004 telah membawa dampak yang besar dan cukup mendasar dalam hubungan keuangan pusat dan daerah. Dalam konsiderannya UU ini menyatakan antara lain bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah berupa system keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar tingkat pemerintahan.

Laporan Realisasi anggaran merupakan jenis laporan keuangan daerah yang lebih dahulu dihasilkan sebelum kemudian diisyaratkan untuk membuat laporan neraca dan laporan arus kas. Anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung (*back-bone*) penyelenggaraan pemerintahan. Usaha pemerintah daerah dalam menggali sumber dana yang berasal dari potensi daerah yang dimiliki serta kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber dana yang ada tercermin dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Oleh karena itu laporan realisasi anggaran menjadi salah satu laporan

pertanggung jawaban keuangan daerah yang utama. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang jujur, demokratis, efektif, efisien, ekonomis dan kuantitatif, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan dan belanja daerah perlu dilaksanakan meskipun terdapat perbedaan kaidah pengakuannya dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: "Bagaimana kinerja keuangan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Pamekasan dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran 2012-2014 dengan analisis Rasio Keuangan?"

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai antara lain: "Untuk mengetahui kinerja keuangan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Pamekasan dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran 2012-2014 dengan analisis Rasio Keuangan".

### **Landasan Teori Dan Konseptualisasi**

#### **Otonomi Daerah**

Otonomi Daerah adalah hak yang dimiliki dan melekat sejak berdirinya daerah tersebut. Pemaknaan ini dapat membuat daerah bertindak semaunya tanpa kontrol sama sekali dari Pusat. Pemaknaan ini berlawanan dengan paham yang menyatakan bahwa daerah tidak memiliki hak otonom karena hak tersebut sesungguhnya baru muncul setelah pusat mendesentralisasikan sebagian kewenangannya kepada daerah. Dengan kata lain, Otonomi daerah adalah pemberian pemerintah pusat melalui asas desentralisasi. (Bastian, 2006; 331)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Otonomi

Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Indonesia disusun menurut tahun Anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember. Undang-Undang No.33 Tahun 2004, sumber penerimaan daerah antara lain:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari beberapa pos pendapatan antara lain pajak daerah, bagian laba usaha daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.
- b. Dana perimbangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang terdiri dari pendapatan bagi hasil pajak bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
- c. Bagian dari pembiayaan daerah yang terdiri dari bagian sisa lebih perhitungan anggaran daerah, pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Sisi pengeluaran daerah, pengaturan belanja diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dalamnya menjelaskan tentang belanja daerah yang diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, dan jenis belanja. Pembiayaan terdiri dari pengeluaran pembiayaan dan penerimaan pembiayaan.

Otonomi daerah hakekatnya merupakan suatu keadaan yang

memungkinkan daerah untuk dapat mengelola segala potensi terbaik yang dimiliki secara optimal. Otonom diharapkan akan mendorong kemampuan daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik ekonomi, geografis dan sosial budaya. Berhasil tidaknya suatu pemerintah dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan Pemerintah Daerah tersebut.

### **Pemerintah Daerah**

PP No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang didalamnya menjelaskan bahwa Pemerintah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.

Pemerintah Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah yaitu pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hubungan antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

## **Akuntansi Keuangan Daerah**

### **Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah**

Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas Pemerintah Daerah-Pemda (Kabupaten, Kota atau Provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas Pemda (Kabupaten, Kota atau Provinsi). Pihak-pihak eksternal entitas Pemda yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh Akuntansi Keuangan Daerah tersebut antara lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); badan pengawas keuangan; investor, kreditor, dandonator; analis ekonomi dan pemerhati Pemda; rakyat; Pemdalain; dan Pemerintah Pusat, yang seluruhnya ada dalam lingkungan Akuntansi Keuangan Daerah (Halim,2004;34).

Pengelolaan keuangan daerah adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam mengelola keuangan yang menjadi wewenang tanggung jawab Pemerintah Daerah agar pengelolaan keuangan tersebut memenuhi prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, transparan, dan akuntabel. Siklus pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya, terdiri dari tiga tahap, yaitu:

1. Tahap Perencanaan.
2. Tahap Pelaksanaan atau Implementasi.
3. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Kinerja.

Pada setiap tahap di dalamnya dapat diklasifikasikan lagi apa yang menjadi *input*, proses dan *output*-nya. Karena ketiga tahap tersebut membentuk suatu siklus, maka *output* yang dihasilkan dari tahap tertentu akan menjadi *input* bagi tahap berikutnya

(Mahmudi,2010;16).

Informasi keuangan Pemerintah Daerah yang paling utama adalah Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Dari dua jenis laporan keuangan tersebut dapat dikembangkan informasi keuangan lainnya, yaitu Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan demikian Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan pada dasarnya merupakan turunan dari laporan keuangan Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran.

### **Sistem dan Basis Pencatatan Akuntansi**

Sistem pembukuan akuntansi yang telah digunakan selama ini, antara lain:

1. Sistem pembukuan tunggal (*single entry*) yaitu pencatatan transaksi hanya pada satu sisi penerimaan atau pada sisi pengeluaran.
2. Sistem pembukuan berpasangan (*double entry*) yaitu pencatatan transaksi yang dilakukan secara berpasangan pada sisi debit dan pada sisi kredit.

Basis akuntansi merupakan dasar akuntansi yang menetapkan kapan suatu transaksi diakui atau dicatat. Pengakuan atau pencatatan transaksi tersebut akan berpengaruh pada laporan keuangan. Jika suatu transaksi belum diakui berarti tidak dicatat dalam sistem akuntansi sehingga tidak akan muncul dalam laporan keuangan. Sebaliknya jika suatu transaksi sudah diakui, maka transaksi itu akan dicatat dalam sistem akuntansi sehingga refleksi dalam laporan keuangan.

Pada dasarnya terdapat tempat basis pencatatan akuntansi yang biasa digunakan oleh Pemerintah Daerah, antara lain: (Halim,2004;39)

1. Akuntansi Basis Kas (*Cash Basis*)  
Akuntansi basis kas yaitu pengakuan atau pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut

menimbulkan perubahan dalam kas.

2. Akuntansi Basis Akrua (*Accrual Basis*)  
Akuntansi basis akrua yaitu dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi (dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
3. Akuntansi Basis Kas Modifikasian (*Modified Cash Basis*)  
Akuntansi basis kas modifikasian yaitu basis yang tepat untuk digunakan dalam mengakuntasikan transaksi keuangan oleh satuan pemegang kas saat ini baik pada satuan kerja maupun pada bagian keuangan atau Biro/Badan Pengelola Kekayaan Daerah karena hampir tidak mungkin suatu Pemerintah Daerah mampu menerapkan basis akrua.
4. Akuntansi Basis Akrua Modifikasian (*Modified Accrual Basis*)  
Akuntansi basis akrua modifikasian yaitu pencatatan transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrua untuk sebagian besar transaksi.

#### **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan keuangan daerah merupakan informasi yang memuat data sebagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas ekonomi suatu organisasi pemerintah daerah. Adapun tujuan Pelaporan Keuangan daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Adapun yang mencakup Laporan Keuangan daerah adalah:

1. Laporan Keuangan Daerah
  2. Neraca Daerah
  3. Laporan Arus Kas
  4. Catatan Atas Laporan Keuangan
- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang berisi tentang informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dari suatu entitas yang dibandingkan dengan anggaran ketiga pos tersebut. Melalui laporan realisasi anggaran dapat diketahui prediksi tentang sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah serta risiko ketidakpastian atas sumber daya ekonomi tersebut.

Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah untuk menerapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. (Bastian, 2006; 139)

Elemen-elemen yang terdapat dalam realisasi anggaran adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan (basis kas) yaitu semua penerimaan kas umum negara/kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar lagi oleh pemerintah (basis kas). Sedangkan pendapatan (basis akrua) yaitu hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
2. Belanja (basis kas) yaitu semua pengeluaran kas umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan belanja (basis akrua) yaitu kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
3. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan.
4. Pembiayaan yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan anggarannya. PSAP 02 Paragraf 14 dijelaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran Sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut: (Tanjung Abdul Hafiz, 2008; 84)

1. Pendapatan
2. Belanja
3. Transfer
4. Surplus atau defisit
5. Penerimaan pembiayaan
6. Pengeluaran pembiayaan
7. Pembiayaan neto
8. Selisih lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)

#### **Klasifikasi Pendapatan Dalam Laporan Keuangan**

Pendapatan adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Secara umum pendapatan dalam laporan keuangan dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  2. Dana Perimbangan
  3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- #### **Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan,

yaitu :

1. Pendapatan pajak daerah, yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui peraturan daerah.
2. Pendapatan retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah atau dengan kata lain retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata.
3. Pendapatan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, negara/BUMN, dan swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-lain PAD yang sah, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pmda, seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dll.

#### **Klasifikasi Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran daerah pada suatu periode anggaran. Secara umum belanja dalam APBD dikelompokkan menjadi lima kelompok, yaitu:

1. Belanja Administrasi Umum
2. Belanja Operasi, Pemeliharaan Sarana, dan Prasarana Publik
3. Belanja Modal
4. Belanja Tak Tersangkan

Belanja administrasi umum adalah semua pengeluaran pemerintah daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau pelayanan publik. Kelompok belanja administrasi umum terdiri atas empat jenis, yaitu:

1. Belanja pegawai
2. Belanja Barang
3. Belanja Perjalanan Dinas

#### 4. Belanja Pemeliharaan

Belanja pegawai Belanja pegawai merupakan pengeluaran daerah untuk orang/personel yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau dengan kata lain merupakan biaya tetap pegawai. Belanja pegawai meliputi:

- a. Biaya gaji dan tunjangan, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan bagi pegawai serta dewan. Contohnya gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan
- b. Biaya perawatan dan pengobatan, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pengeluaran kesehatan pegawai dan dewan yang ditanggung pemerintah daerah, dan pengobatan lanjutan luar daerah
- c. Biaya pengembangan sumber daya manusia, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menunjang kualitas sumber daya manusia. Contohnya biaya beasiswa bantuan tugas belajar ikatan dinas, biaya kursus keterampilan dan *job training*.

Belanja Barang merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang atau jasa yang tidak berhubungan langsung dalam pelayanan publik. Belanja barang terdiri dari:

- a. Biaya barang habis pakai, contohnya biaya alat listrik dan elektronik, biaya alat tulis dan biaya gas.
- b. Biaya jasa kantor, yaitu biaya yang berhubungan dengan pelayanan serta penunjang administrasi kantor. Contohnya biaya kawat dan faks dan biaya pengiriman.
- c. Biaya cetak dan penggandaan, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mencetak dan penggandaan. Contohnya barang setakan dan fotokopi.
- d. Biaya langganan, yaitu pengeluaran yang dibayar setelah manfaatnya dinikmati selama suatu periode. Contohnya biaya listrik, biaya telepon, dan biaya air.
- e. Biaya pakaian dinas, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk penyediaan pakaian dinas pegawai. Contohnya biaya pakaian

dinas biaya pakaian upacara.

Belanja Perjalanan Dinas merupakan pengeluaran untuk biaya perjalanan pegawai dan dewan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik. Biaya ini terdiri dari:

- a. Biaya perjalanan dinas, yaitu pengeliraran perjalanan pegawai atau dewan yang menjalankan tugas. Contohnya biaya perjalanan dinas dalam daerah dan biaya perjalanan dinas luar daerah
- b. Biaya perjalanan pindah, yaitu pengeluaran perjalanan pegawai yang pindah. Contohnya biaya perjalanan pindah dalam daerah dan biaya perjalanan pindah luar daerah
- c. Biaya pemulangan pegawai yang gugur, dipensiunkan, dan cuti besar. Contohnya biaya pemulangan dipensiunkan, biaya pemulangan dipensiun liar daerah, dan biaya pemulangan pegawai yang telah gugur.

Belanja Pemeliharaan merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik. Biaya pemeliharaan ini terdiri dari:

- a. Biaya pemeliharaan gedung kantor. Contohnya biaya pemeliharaan pintu dan jendela, biaya pemeliharaan atap, dan biaya pemeliharaan lantai.
- b. Biaya pemeliharaan ruma dinas dan asrama. Contohnya sama dengan butir a diatas .
- c. Biaya pemeliharaan *meubelair*, yaitu pengeluaran yang terkait dengan pemeliharaan *meubelair* kantor. Contohnya biaya pemeliharaan meja, kursi, dan lemari
- d. Biaya pemeliharaan peralatan kantor, yaitu pengeluaran barang kantor yang apabila dioperasikan merupakan operator. Contohnya biaya pemeliharaan AC, *sound system*, dan OHP.
- e. Biaya pemeliharaan peralatan kantor, yaitu pengeluaran barang kantor yang apabila

dioperasikan tidak memerlukan operator. Contohnya biaya pemeliharaan komputer, mesin ketik, dan mesin fotokopi.

- f. Biaya pemeliharaan *emplasment* kantor. Contohnya biaya pemeliharaan pagar, taman, dan halaman parkir.

Belanja Operasional dan Pemeliharaan Sarana, dan Prasarana Publik belanja ini merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Kelompok belanja ini meliputi:

1. Belanja pegawai
2. Belanja Barang
3. Belanja Perjalanan
4. Belanja Pemeliharaan

Belanja pegawai (Belanja Operasional dan Pemeliharaan Sarana, dan Prasarana Publik) merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orang/personal yang berhubungan langsung dengan suatu aktivitas atau dengan kata lain merupakan belanja pegawai yang bersifat variabel.

Belanja pegawai ini terdiri dari:

- a. Honorarium, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk honor personal/orang yang secara langsung melaksanakan suatu kegiatan atau aktivitas. Contohnya honor bulanan, dan honor proyek
- b. Upah lembur, yaitu pengeluaran untuk pemberian upah pada pegawai karna bekerja diluar jam kerja
- c. Upah, yaitu pengeluaran untuk pemberian upah pada pegawai harian, yang meliputi upah harian tetap dan upah harian lepas.
- d. Insentif, yaitu pengeluaran guna pemberian uang perangsang atau inisiatif orang/personal yang bekerja untuk suatu kegiatan.

Belanja pemeliharaan (Belanja Operasional dan Pemeliharaan Sarana, dan Prasarana Publik) merupakan pengeluaran pemerintah dan untuk pemeliharaan barang daerah yang mempunyai hubungan langsung dengan pelayanan publik. Biaya pemeliharaan ini terdiri dari:

- a. Biaya pemeliharaan gedung pelayanan umum. Contohnya biaya pemeliharaan gedung Dinas.
- b. Biaya pemeliharaan lajan dan jembatan. Contohnya biaya pemeliharaan jembatan.
- c. biaya pemeliharaan kendaraan. Contohnya biaya pengujian kendaraan, biaya raparasi dan penggantian suku cadang, dan pembelian ban.
- d. Biaya pemeliharaan mesin. Contohnya biaya pemeliharaan mesin cetak, biaya pemeliharaan mesin pengeboran tanah.
- e. Biaya pemeliharaan sungai dan daluran/kanal
- f. Biaya pemeliharaan museum. Contohnya biaya pemeliharaan museum perjuangan, biaya pemeliharaan museum peninggalan purbakala, dan biaya pemeliharaan museum budaya.

Belanja Tak Tersangka adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan tak terduga dan kejadian-kejadian luar biasa.

Belanja Modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasional dan pemeliharaan. Belanja modal dibagi menjadi:

1. Belanja Publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Contohnya belanja publik: pembangunan jembatan dan jalan raya
2. Belanja aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Contohnya belanja aparatur: pembangunan gedung pemerintah, pembelian kendaraan dinas, dan pembangunan rumah dinas.

### **Kinerja Keuangan Daerah**

Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/

kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi (Bastian,2006;274).

Menurut Stout (1993) dalam Bastian (2006) menyatakan bahwa: “pengukuran/penilaian kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (*Mission Accomplishment*) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa ataupun suatu proses”.

Whittaker (1993) dalam Bastian (2006;275) mendefinisikan Kinerja sebagai berikut: “Pengukuran/kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan Akuntabilitas”.

Pengukuran kinerja merupakan alat manajemen, oleh karena itu tujuan dan manfaat pengukuran kinerja untuk: (Bastian,2006;275)

1. Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja.
2. Memastikan tercapainya skema kinerja yang disepakati.
3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan skema kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja.
4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang obyektif atas kinerja yang dicapai setelah dibandingkan dengan skema indikator kinerja yang telah disepakati.
5. Menjadikan alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi.
6. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
8. Memastikan bahwa dalam pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.

9. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.

10. Mengungkap permasalahan yang terjadi.

Pengukuran kinerja terdapat beberapa aspek yang biasanya suatu organisasi tertarik untuk mengukurnya antara lain: aspek finansial, kepuasan pelanggan, operasi dan bisnis internal, kepuasan pegawai, kepuasan komunitas/stakeholders dan waktu. namun pada aspek finansial ini sangat penting diperhatikan dalam pengukuran kinerja, sehingga kondisi keuangan dapat dianalogikan sebagai aliran darah dalam tubuh manusia. (Bastian,2006;276).

Setiap laporan kinerja akan menampilkan hasil yang diharapkan secara signifikan. Sementara itu, setiap sistem pengukuran kinerja bermaksud menelusuri permasalahan hasil, sehingga manajemen dapat menilai “apakah tindakan koreksi dapat dilakukan untuk meraih hasil yang diinginkan”(Bastian,2006;316).

Pada dasarnya pengukuran kinerja keuangan daerah menyangkut tiga bidang analisis yang saling terkait satu dengan yang lainnya, ketiga bidang analisis tersebut meliputi:

- a. Analisis penerimaan, yaitu analisis mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial.
- b. Analisis pengeluaran, yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan publik dan faktor-faktor yang menyebabkan biaya-biaya tersebut meningkat.
- c. Analisis anggaran, yaitu analisis mengenai hubungan antara pendapatan dan pengeluaran serta kecenderungan yang diproyeksikan untuk masa depan.

#### **Analisis Rasio Keuangan**

Analisis rasio keuangan seperti halnya alat-alat analisis yang lain adalah *futureoriented* yaitu untuk orientasi dimasa yang akan datang, oleh karena itu penganalisa harus mampu untuk menyesuaikan factor-faktor yang ada pada periode atau waktu ini dengan faktor-faktor dimasa yang akan datang yang mungkin akan mempengaruhi posisi keuangan atau hasil operasi yang bersangkutan (Munawir,2007;64).

Mengadakan perbandingan rasio, penganalisa jangan hanya berpegang teguh pada standar rasio saja, akan tetapi harus memperhatikan trend atas prosentase historis dari rasio keuangan perusahaan yang sedang dianalisa. Dengan membandingkan angka rasio periode sekarang dengan angka rasio periode yang lalu akan diketahui perubahan angka rasio yang dimiliki perusahaan dan akan diketahui pula kecenderungan kondisi keuangan perusahaan yang bersangkutan (Munawir,2007;67).

Beberapa rasio keuangan yang dapat dikembangkan berdasarkan data laporan keuangannya sebagai berikut: (Mahmudi,2010;142)

#### 1. Analisis varians (selisih) Anggaran pendapatan

Analisis varians Anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dilakukan. Biasanya selisih anggaran sudah diinformasikan dalam laporan Realisasi Anggaran yang disajikan oleh pemerintah daerah. Informasi selisih anggaran tersebut sangat membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisa kinerja pendapatan. Dalam analisa selisih anggaran pendapatan, hal pertama yang dilakukan oleh pembaca laporan adalah:

- Melihat besarnya selisih anggaran pendapatan dengan realisasi baik secara nominal maupun persentasi
- Menetapkan tingkat selisih yang dapat ditoleransi atau dianggap wajar

- Menilai signifikan tidaknya selisih tersebut jika dilihat dari total pendapatan
- Menganalisis penyebab terjadinya selisih anggaran pendapatan. (Mahmudi,2010;137).

#### 2. Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerima daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. (Mahmudi,2010;142).

Derajat Desentralisasi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

#### 3. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah ( PAD )

Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD yang dianggarkan. Rasio efektivitas PAD menunjukkan Kemampuan Pemerintah Daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut: (Mahmudi,2010:143)

- Sangat efektif : >100%
- Efektif : 100%
- Cukup efektif : 90% - 99%
- Kurang efektif : 75% - 89%
- Tidak efektif : <75%

Rasio Efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

#### 4. Analisis Varians Belanja

Dalam hal belanja daerah terdapat ketentuan bahwa anggaran belanja

merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah akan dinilai baik kinerja belanjanya apabila realisasi belanja tidak melebihi yang dianggarkan. Analisis varians merupakan analisis terdapat perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Analisis varians cukup sederhana namun dapat memberikan informasi yang sangat berarti. (Mahmudi, 2010; 157).

#### 5. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio Efisiensi Belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat *absolute*, tetapi relatif. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Pemerintah Daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaiknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran (Mahmudi, 2010: 166).

Rasio Efisiensi Belanja dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi Belanja} \\ &= \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \\ &\times 100\% \end{aligned}$$

Informasi laporan keuangan dalam neraca juga sangat penting untuk menghitung rasio keuangan tertentu. Beberapa realisasi rasio keuangan memang ada yang kurang relevan untuk sektor publik, dan lebih cocok untuk sektor bisnis yang tujuan utamanya untuk mencari laba, karena tujuan menggunakan analisis rasio tersebut adalah dalam rangka menilai kinerja keuangan yang berhubungan dengan laba.

## Metode Penelitian

### Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan permasalahan, maka jenis penelitian ini adalah Penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian dengan pendekatan deskriptif kuantitatif merupakan metode penelitian dengan mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena yang nampak dari data- data bersifat kuantitatif yang telah dianalisis.

### Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini yaitu Dinas PU Bina Marga Kabupaten Pamekasan.

### Definisi Operasional Variabel

Dalam operasionalisasi penelitian ini, peneliti menggunakan variabel rasio dalam menganalisis laporan Realisasi Anggaran Dinas PU Bina Marga Kabupaten Pamekasan. Rasio yang digunakan yaitu:

1. Analisis varian anggaran pendapatan
 

Merupakan anggaran yang dihitung dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dilakukan. Dalam analisis selisih anggaran pendapatan, hal utama yang perlu dilakukan oleh pembaca laporan adalah :

  - a. Melihat besarnya selisih anggaran pendapatan dengan realisasinya baik secara nominal maupun persentasi
  - b. Menetapkan tingkat selisih yang dapat ditoleransi atau dianggap wajar
  - c. Menilai signifikan tidaknya selisih tersebut jika dilihat dari selisih pendapatan
  - d. Menganalisis penyebab terjadinya selisih anggaran pendapatan.
2. Derajat Desentralisasi
 

Merupakan perhitungan berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah.

### 3. Rasioefektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Merupakan perhitungan dengan caramembandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan).

Secara umum, nilai efektivitas PAD dapatdikategorikansebagai berikut:

- Sangatefektif : >100%
- Efektif : 100%
- Cukufektif : 90% - 99%
- Kurangefektif : 75% - 89%
- Tidakefektif : <75%

### 4. Analisis Varians Belanja

Selisih anggaran belanja dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Selisih disukai (*favourable variance*) dan
2. Selisih tidak disukai (*unfavourable variance*) Dalam hal realisasi belanja lebih kecil dari anggaran maka disebut *favourable variance*,

Sedangkan jika realisasi belanja lebih besar dari anggaran belanja maka dikategorikan *unfavourable variance*. Hal yang terpenting yang harus diperhatikan dalam analisa varians ini adalah:

1. Mempertanyakan alasan terjadinya varians. Apakah selisih tersebut cukup beralasan dan dapat dipertanggung jawabkan?
2. Berapa besarnya varians, apakah jumlahnya signifikan atau tidak?
3. Berapa tingkat selisih (variens) yang bisa ditoleransi?

### 5. Rasio Efisiensi Belanja

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan Pemerintah Daerah.

### Jenis dan Sumber data

Jenis dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber yang asli (tidak melalui media perantara). Data

ini diperoleh langsung dari bagian keuangan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Pamekasan.

### Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer dari penelitian ini, dilakukan penelitian lapangan dengan menggunakan Wawancara dan Observasi.

Wawancara sebagai upaya mendekati informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung. Adapun dalam pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara bersama antara lain Kepala Dinas dan Bendahara PU Bina Marga. Hal demikian dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data secara luas.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti bisa direalisasikan dengan cara mencatat berupa informasi yang berhubungan dengan Laporan Realisasi Anggaran. Dengan observasi penelitian ini, peneliti dapat melihat secara langsung mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Dinas PU Bina Marga Kabupaten Pamekasan dalam hal kinerja keuangan. Peneliti dapat melakukan pengamatan secara langsung dalam mendapatkan bukti yang terkait dengan objek penelitian.

### Teknik Analisis Data

Langkah-langkah analisis dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengumpulkan data-data keuangan APBD Dinas PU Bina Marga Kabupaten Pamekasan yang berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
2. Melakukan perhitungan analisis rasio keuangan pada tahun 2012-2014.
3. Melakukan perhitungan Derajat Desentralisasi

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: (Mahmudi, 2010:142).

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

4. Melakukan perhitungan Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
Rasio Efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut: (Mahmudi, 2010; 143).

$$\text{Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

5. Melakukan perhitungan Rasio Efisiensi Belanja  
Rasio Efisiensi Belanja dirumuskan sebagai berikut: (Mahmudi, 2010; 166).

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

6. Melakukan analisis atas hasil perhitungan rasio keuangan.  
7. Menyajikan hasil analisis rasio keuangan yang selanjutnya dapat diketahui kinerja keuangan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Pamekasan.  
8. Membuat kesimpulan.

## Hasil Dan Pembahasan Penelitian

### Analisis

Setelah melakukan penelitian pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Pamekasan Peneliti memperoleh data yang diperlukan Dalam penyusunan laporan keuangan, sebagai entitas Akuntansi menggunakan basis kas (Cash Basis) dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk perhitungan analisis Rasio Keuangan berdasarkan data-data keuangan yang telah diperoleh, maka perhitungan analisis Rasio Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut:

### Analisis Varians Anggaran Pendapatan

Analisis varian Anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan Anggaran yang dilakukan. Biasanya selisih anggaran sudah diinformasikan dalam laporan Realisasi Anggaran yang disajikan oleh Pemerintah Daerah. Informasi selisih anggaran tersebut sangat membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisa kinerja pendapatan.

**Tabel 4.1.**  
**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2012**  
**Dinas PU Bina Marga Kabupaten Pamekasan**

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	
1	<b>PENDAPATAN</b>				
1,1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	0	0	0	
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	158.126.390,00	388.612.454,00	(230.486.064,00)	2,46
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	1.500.000,00	354.985.960,00	(353.485.960,00)	236,66
1,2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	0	0	0	
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumberdaya alam)	0	0	0	
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	0	0	0	
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	0	0	0	
1.2.2	Transfer pemerintah Pusat – Lainnya				
1.2.2.1	Dana otonomi khusus	0	0	0	
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	0	0	0	
1.2.3	Transfer Pemerintah Propinsi*)				
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	0	0	0	
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil lainnya	0	0	0	

1,3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH.</b>				
1.3.1	Pendapatan Hibah	0	0	0	
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0	0	0	
1.3.3	Pendapatan lainnya.	0	0	0	
	<b>Jumlah</b>	<b>159.626.390,00</b>	<b>743.598.414,00</b>	<b>(583.972.024,00)</b>	<b>4,66</b>

Sumber: Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran 2012

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran diatas, pada tahun 2012 secara umum terdapat selisih anggaran pendapatan dengan realisasi yang bersaldo positif. Hal ini mengindikasikan

bahwa kinerja pendapatan pemerintah sangat baik karena mampu memperoleh pendapatan yang melebihi dengan jumlah yang dianggarkan.

**Tabel 4.2.**  
**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2013**  
**Dinas PU Bina Marga Kabupaten Pamekasan**

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	
1	<b>PENDAPATAN</b>				
1,1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	0	0	0	
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	180.100.000,00	332.715.465,00	(152.615.465,00)	(0,85)
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	130.790.500,00	46.253.350,00	84.537.150	0,65
1,2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	0	0	0	
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumberdaya alam)	0	0	0	

1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	0	0	0
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	0	0	0
1.2.2	Transfer pemerintah Pusat – Lainnya			
1.2.2.1	Dana otonomi khusus	0	0	0
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	0	0	0
1.2.3	Transfer Pemerintah Propinsi <sup>*)</sup>			
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	0	0	0
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil lainnya	0	0	0
1,3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH.</b>			
1.3.1	Pendapatan Hibah	0	0	0
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0	0	0
1.3.3	Pendapatan lainnya.	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>310.890.500</b>	<b>378.968.815</b>	<b>(68.078.315)</b>
				<b>(0,22)</b>

Sumber: Lampiran 2 Laporan Realisasi Anggaran 2013

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran diatas, pada tahun 2013 secara umum terdapat selisih anggaran pendapatan dengan realisasi yang bersaldo positif. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pendapatan pemerintah sangat baik karena mampu

memperoleh pendapatan yang melebihi dengan jumlah yang dianggarkan. Meskipun pada tahun ini jumlah Anggaran Lebih besar di tahun 2012 tetap dapat merealisasikan pendapatannya melebihi dengan yang dianggarkan.

**Tabel 4.3.**

**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2014**

**Dinas PU Bina Marga Kabupaten Pamekasan**

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
------------	--------	----------------------------	-----------	----------------	---

1	2	3	4	5
1	<b>PENDAPATAN</b>			
1,1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>			
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	0	0	0
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	27.500.000,00	82.853.000,00	(55.353.000,00)
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	-	7.723.000,00	(7.723.000,00)
1,2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>			
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan			
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	0	0	0
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumberdaya alam)	0	0	0
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	0	0	0
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus.	0	0	0
1.2.2	Transfer pemerintah Pusat – Lainnya			
1.2.2.1	Dana otonomi khusus	0	0	0
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	0	0	0
1.2.3	Transfer Pemerintah Propinsi <sup>*)</sup>			
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	0	0	0
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil lainnya	0	0	0

1,3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH.</b>			
1.3.1	Pendapatan Hibah	0	0	0
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0	0	0
1.3.3	Pendapatan lainnya.	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>27.500.000,00</b>	<b>90.576.000,00</b>	<b>(63.076.000.00)</b>

Sumber: Lampiran 3 Laporan Realisasi Anggaran 2014

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran diatas, pada tahun 2014 secara umum terdapat selisih anggaran pendapatan dengan realisasi yang bersaldo positif. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pendapatan pemerintah sangat baik karena mampu memperoleh pendapatan yang melebihi dengan jumlah yang dianggarkan. Meskipun pada tahun ini jumlah anggaran lebih kecil dari tahun 2013 dapat merealisasikan pendapatannya melebihi dengan yang dianggarkan.

Berdasarkan analisis Varians Anggaran Pendapatan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 kinerja Dinas PU Bina Marga

Dapat dikatakan sangat baik, hal ini dapat dilihat dari realisasi pendapatan yang setiap tahunnya melebihi anggaran yang ditargetkan.

#### Derajat Desentralisasi

Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. (Mahmudi, 2010; 142).

Table 4.4. dibawah ini menunjuk perhitungan Derajat Desentralisasi.

**Tabel 4.4.**

#### Derajat Desentralisasi

#### Dinas PU Bina Marga Kabupaten Pamekasan

TTAHUN	PAD	Total Pendapatan	RASIO (%)	Naik/(Turun) (%)
22012	388.612.454,00	743.598.414,00	52,26	
22013	332.715.465,00	378.968.815,00	87,79	35,53
22014	82.853.000,00	90.576.000,00	91,47	3,68

Sumber: Lampiran 1, 2, 3 (data diolah)

Derajat desentralisasi Dinas PU Bina Marga Pada Tahun 2012 sebesar 52,26% , pada tahun 2013 sebesar 87,79%, kemudian pada tahun 2014 sebesar 91,47%. Pada tahun 2012-2014 mengalami Kenaikan Sebesar 35,53% dan 3,68%.

#### Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD yang dianggarkan.

Rasio efektivitas PAD menunjukkan Kemampuan Pemerintah Daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut: (Mahmudi, 2010:143).

Tabel 4.5. di bawah ini menunjukkan perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah.

**Tabel 4.5.**  
**Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah**  
**Dinas PU Bina Marga Kabupaten Pamekasan**

TAHUN	Realisasi PAD	Target PAD	RASIO (%)	Naik/(Turun) (%)
2012	388.612.454,00	158.126.390,00	245,76	
2013	332.715.465,00	180.100.000,00	184,74	(61,02)
2014	82.853.000,00	27.500.000,00	301,28	116,54

Sumber: Lampiran 1, 2, 3 (data diolah)

Tabel 4.5. menunjukkan bahwa dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2012, 2013, dan 2014 sudah efektif, karena realisasi atau penerimaan PAD sudah melebihi target penerimaan PAD setiap tahunnya. Kinerja Dinas PU Bina Marga Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam Efektivitas Pendapatan Asli Daerahnya Pada tahun 2012-2013 mengalami Penurunan kinerja yaitu sebesar (61,02%), sedangkan tahun 2013-2014 Mengalami Kenaikan Kinerja yaitu 116,54%. Dalam hal ini kinerja Dinas PU Bina Marga pada tahun 2012-2014 melalui analisis rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan dapat

dikategorikan efektif.

#### Analisis Varian Belanja

Dalam hal belanja daerah terdapat ketentuan bahwa anggaran belanja meruakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah akan dinilai baik kinerja belanjanya apabila realisasi belanja tidak melebihi yang dianggarkan. Analisis varians merupakan analisis terdapat perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Analisis varians cukup sederhana namun dapat memberikan informasi yang sangat

berarti.(Mahmudi,2010;157).

Tabel 4.6.di bawah ini menunjukkan perhitungan Analisa Varian Belanja.

**Tabel 4.6.**  
**Laporan Realisasi Anggaran Belanja**  
**Dinas PU Bina Marga Kabupaten Pamekasan**

TAHUN	ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	(%)
2012	135.193.464.701,68	129.332.003.829,00	5.861.460.872,68	95,66%
2013	151.457.981.673,20	127.223.988.281,00	24.233.993.392,20	84,00%
22014	199.011.185.637,40	154.463.226.075,00	44.547.959.562,40	77,62%

Sumber: Lampiran 1, 2, 3 (data diolah)

Berdasarkan laporan realisasi anggaran Dinas PU Bina Marga pada tahun 2012 secara umum terdapat selisih anggaran belanja bersaldo positif.Hal ini mengindikasikan adanya efisiensi atau penghematan anggaran. Anggaran belanja terserap 95,66%, penghematan anggaran belanja yang dilakukan dalam tahun 2012 sebesar 5.861.460.872,68dari total APBD. Pada tahun 2013, secara umum terdapat selisih anggaran belanja bersaldo positif.Hal ini mengindikasikan adanya efisiensi atau penghematan anggaran. Anggaran belanja terserap 84,00%, penghematan anggaran belanja yang dilakukan dalam tahun 2013 sebesar 24.233.993.392,20dari total APBD. Pada tahun 2014, secara umum terdapat selisih anggaran belanja bersaldo positif.Hal ini mengindikasikan adanya efisiensi atau penghematan anggaran. Anggaran belanja terserap 77,62%, penghematan anggaran belanja yang dilakukan dalam tahun 2014 sebesar 44.547.959.562,40 total APBD. Jumlah penghematan tersebut jika dilihat dari persentasenya memang tidak begitu

besar, namun jika dilihat dari nominalnya cukup signifikan dan dapat dikatakan Dalam Dinas PU Bina Marga memiliki kinerja yang cukup baik dalam penghematan anggaran belanja.

#### **Rasio Efisiensi Belanja**

Rasio Efisiensi Belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja.Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah.Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat *absolute*, tetapi relatif.Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Pemerintah Daerah dinilai telah meleakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran (Mahmudi,2010:166).

Tabel.4.7. di bawah ini menunjukan perhitungan Rasio Efisiensi Belanja.

**Tabel 4.7.**  
**Rasio Efisiensi Belanja**  
**Dinas PU Bina Marga Kabupaten Pamekasan**

TTAHUN	Realisasi Belanja	Anggaran Belanja	RASIO (%)	Naik/(Turun) (%)
22012	129.332.003.829,00	135.193.464.701,68	95,66	
22013	127.223.988.281,00	151.457.981.673,20	84,00	(11,66)
22014	154.463.226.075,00	199.011.185.637,40	77,62	(6,38)

Sumber: Lampiran 1, 2, 3 (data diolah)

Tabel 4.7. menunjukkan bahwa Rasio Efisiensi Belanja pada tahun 2012 rasionya sebesar 95,66%, pada tahun 2013 rasionya mengalami Penurunan sebesar 11,66% sehingga Menjadi 84,00% dan pada tahun 2014 rasionya mengalami penurunan sebesar 6,38% sehingga menjadi 77,62% menunjukkan bahwa kinerja keuangannya sudah efisien karena realisasi belanja lebih rendah dari anggaran belanja setiap tahun. kinerja Dinas PU Bina Marga pada tahun 2012, 2013, dan tahun 2014 melalui analisis rasio efisiensi dapat dikategorikan efisien karena rasionya tidak lebih dari 100%. Namun pengeluaran belanja pada setiap pemerintah daerah juga mesti dilihat tergantung dengan keperluan kegiatan operasi dan pembangunan untuk mencapai pertumbuhan yang optimal. Dalam hal efisiensi belanja, Dinas PU Bina Marga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu bagaimana gejala jika terjadi kenaikan atau penurunan pada Pemerintah Daerah.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kinerja Dinas PU Bina Marga Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial kepada masyarakat Pada tahun 2012-2013 mengalami Penurunan kinerja yaitu sebesar (61,02%), sedangkan tahun 2013-2014 Mengalami Kenaikan Kinerja yaitu 116,54% Meskipun demikian Pendapatan Asli Daerah sudah efektif.
2. Kendala dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas PU Bina Marga pertahun adalah kesalahan pencatatan transaksi dan tidak lengkapnya dokumen sumber pencatatan.
3. Kesalahan pencatatan yang sering terjadi antara lain menyangkut kode program dan kegiatan serta kode rekening belanja. Sedangkan dokumen sumber yang tidak lengkap menyangkut pembayaran SP2D LS untuk Pihak ketiga.
4. Pendapatan dan Belanja Dinas PU Bina Marga pemerintah kabupaten Pamekasan yang selalu mengalami penghematan setiap tahunnya melalui Analisis Varians Anggaran Pendapatan, Derajat Desentralisasi, Rasio Efektivitas PAD, Analisis Varians Belanja, dan Rasio Efisiensi Belanja. Seperti halnya dalam Rasio Efisiensi Belanja pada tahun 2012



rasionya sebesar 95,66%, pada tahun 2013 rasionya sebesar 84,00%, kemudian pada tahun 2013 rasionya mengalami Penurunan sebesar (11,66%) sehingga Menjadi 84,00% dan pada tahun 2014 rasionya mengalami penurunan sebesar (6,38%) sehingga menjadi 77,62%, kinerja Dinas PU Bina Marga pada tahun 2012, 2013, dan tahun 2014 melalui analisis rasio efisiensi dapat dikategorikan efisien karena rasionya tidak lebih dari 100%.

#### **Daftar Pustaka**

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik, Suatu Pengantar*. Erlangga: Jakarta.
- Cherrya Dhia Wenny 2012. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah STIE MDP Forum Bisnis Dan Kewirausahaan*
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat: Jakarta.
- Hendra Arafat 2010, Analisis Atas Laporan Realisasi Anggaran Untuk mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Batu. *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang*.
- Julliet Angel Gozaliem (2013), yang berjudul Analisis Pendapatan Dan Belanja Pada Pemerintah Kota Bitung. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado*.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerinntah Daerah*. UPP Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN: Yogyakarta.

Munawir. 2007. *Analisis Laporan Keuangan*.  
Liberty: Yogyakarta.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, 2014 *Tentang Pemerintah Daerah*.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, 2010. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*  
.135

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, 2005. *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*.  
Penerbit Alfabeta: Bandung.

Tanjung, Abdul Hafiz 2008. *Akuntansi Pemerintah Daerah*. Alfabeta: Bandung.

Wahyuni, Nanik. 2007. Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang. *Karya Ilmiah*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN MALIKI Malang